

## BAB II

### PERAN CHINA DALAM DINAMIKA KONFLIK SURIAH

Bab ini bertujuan memberikan landasan empiris sebelum masuk ke analisis kebijakan luar negeri China. Pembahasan tidak langsung difokuskan pada China, melainkan terlebih dahulu menjelaskan konteks konflik yang melatarbelakanginya. Hal ini penting karena kebijakan luar negeri tidak terbentuk dalam ruang hampa, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan eksternal tempat suatu negara beroperasi.

Oleh karena itu, bagian awal bab memaparkan perkembangan konflik Suriah sejak awal pecahnya kekerasan domestik hingga berubah menjadi konflik bersenjata berkepanjangan. Penjelasan ini diperlukan untuk menunjukkan bagaimana konflik tersebut berkembang dari konflik internal menjadi konflik internasional yang melibatkan berbagai aktor eksternal. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada kompleksitas aktor yang terlibat, baik aktor negara maupun non-negara. Keberagaman kepentingan dan bentuk intervensi tersebut yang kemudian membentuk struktur konflik Suriah sebagai konflik *multi-layered*, sehingga menciptakan ruang bagi keterlibatan kekuatan besar, termasuk China. Dengan memahami dinamika konflik dan struktur aktor yang ada, analisis mengenai kebijakan luar negeri China pada bagian berikutnya dapat ditempatkan dalam konteks strategis yang lebih jelas.

## **2.1. Dinamika Konflik Suriah**

### **2.1.1. Konteks Konflik Suriah**

Konflik Suriah berawal dari gelombang protes prodemokrasi pada Maret 2011 di kota Daraa yang dipicu oleh penangkapan serta penyiksaan terhadap sejumlah remaja yang menuliskan slogan anti-pemerintah di dinding sekolah (Britannica, 2018). Demonstrasi yang awalnya bersifat damai tersebut kemudian meluas ke berbagai kota besar seperti Homs, Hama, dan Damaskus dengan tuntutan reformasi politik serta pembatasan kekuasaan aparat keamanan. Respons represif pemerintah Suriah terhadap demonstrasi tersebut mendorong radikalisasi gerakan oposisi dan memicu terbentuknya kelompok perlawanan bersenjata seperti Free Syrian Army (FSA), sehingga konflik berkembang dari krisis politik menjadi konflik bersenjata domestik (Council on Foreign Relations, 2019; Capek & Abboud, 2017).

Seiring berjalannya waktu, konflik Suriah mengalami proses internasionalisasi yang semakin intensif. Salah satu perkembangan penting dalam dinamika konflik adalah munculnya kelompok teroris transnasional Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang berhasil menguasai sejumlah wilayah di Suriah dan Irak serta mendeklarasikan kekhalifahan pada tahun 2014 (Jin, 2017). Kehadiran ISIS mengubah karakter konflik Suriah menjadi konflik multidimensional yang tidak hanya melibatkan pemerintah dan oposisi domestik, tetapi juga memicu keterlibatan berbagai aktor eksternal dalam upaya kontra-terorisme global (Phillips, 2016). Ancaman

tersebut mendorong pembentukan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang mulai melancarkan operasi militer udara terhadap ISIS di wilayah Suriah sejak September 2014 (Lynch, 2015).

Memasuki periode setelah 2015, konflik Suriah semakin berkembang menjadi arena kompetisi geopolitik antara berbagai kekuatan besar. Intervensi militer Rusia pada September 2015 menjadi salah satu titik balik penting dalam dinamika konflik karena secara signifikan memperkuat posisi pemerintah Suriah di medan perang (Ivanciu, 2016). Melalui operasi udara, dukungan intelijen, serta koordinasi dengan Iran dan kelompok Hezbollah, Rusia membantu pemerintah Suriah merebut kembali sejumlah wilayah strategis yang sebelumnya dikuasai kelompok oposisi (Phillips, 2016). Keterlibatan Rusia ini sekaligus memperlihatkan bahwa konflik Suriah tidak lagi sekadar konflik domestik, tetapi telah berkembang menjadi arena rivalitas kepentingan antara berbagai aktor regional dan global (Ghiselli & Alsudairi, 2022).

Selain Rusia dan Amerika Serikat, sejumlah aktor lain juga terlibat secara aktif dalam dinamika konflik Suriah. Iran meningkatkan dukungan militernya terhadap pemerintah Suriah melalui pengiriman penasihat militer dan dukungan terhadap kelompok milisi sekutu. Sementara itu, Turki melakukan beberapa operasi militer lintas batas di wilayah utara Suriah untuk menahan ekspansi milisi Kurdi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Partai Buruh Kurdistan (PKK) (Phillips, 2016). Kehadiran berbagai

aktor eksternal tersebut menjadikan konflik Suriah sebagai konflik multi-aktor yang melibatkan kepentingan keamanan regional maupun global.

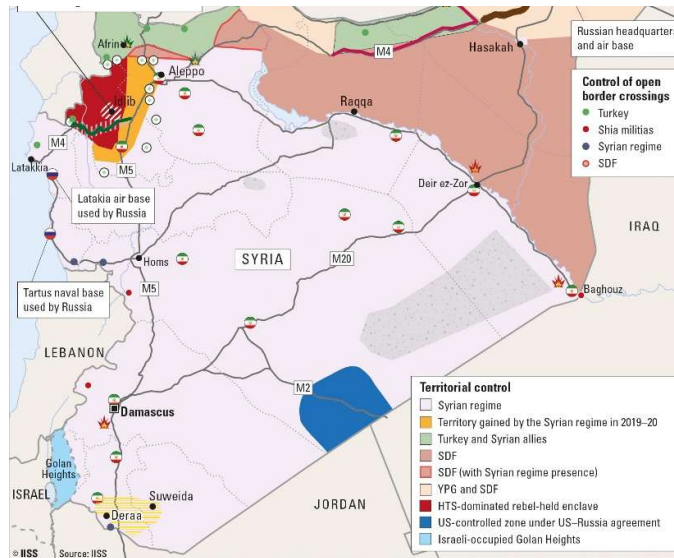
Meskipun intensitas pertempuran berskala besar mulai menurun setelah pemerintah Suriah berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah strategis dengan dukungan Rusia dan Iran, konflik Suriah tetap menyisakan fragmentasi wilayah dan ketidakstabilan politik yang berkelanjutan. Wilayah Suriah terbagi ke dalam beberapa zona kontrol yang berbeda, termasuk wilayah yang berada di bawah kendali pemerintah Suriah, wilayah yang dikuasai kelompok oposisi, serta wilayah yang berada di bawah pengaruh aktor eksternal. Kondisi ini menciptakan situasi yang sering digambarkan sebagai “*no war, no peace*”, yaitu kondisi di mana pertempuran berskala besar menurun tetapi ketegangan militer dan politik tetap berlangsung (Phillips, 2022).

Selain dimensi militer dan geopolitik, konflik Suriah juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Perang yang berlangsung selama lebih dari satu dekade menyebabkan ratusan ribu korban jiwa serta jutaan pengungsi internal maupun eksternal. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa lebih dari 306.000 warga sipil meninggal dunia selama sepuluh tahun pertama konflik, sementara jutaan lainnya terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon, dan Yordania (Agus, 2022; Gazze Destek Derneği, 2022). Situasi ini

menjadikan konflik Suriah sebagai salah satu krisis kemanusiaan yang paling serius dalam sistem internasional kontemporer.

**Gambar 2. 1** Peta Konflik Suriah

**Gambar 2. 2** Pemetaan Aktor dalam Konflik Suriah  
**Gambar 2. 3** Peta Konflik Suriah



Sumber: (Petrini et al., 2021).

Berdasarkan persebaran wilayah yang terlihat pada peta tersebut, konflik Suriah tidak berkembang secara statis, melainkan mengalami perubahan pola dan intensitas dari waktu ke waktu.

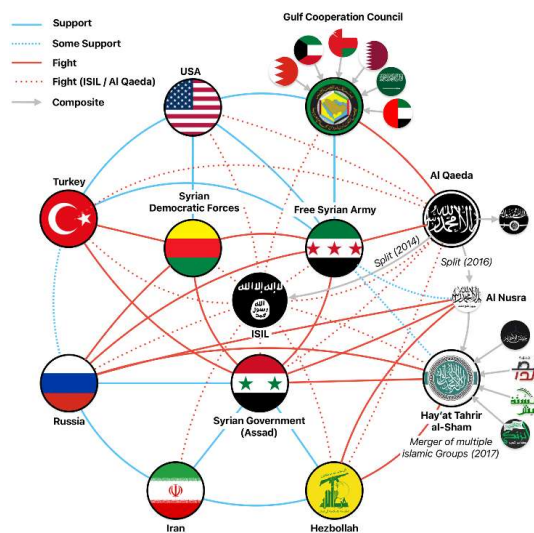
Dalam perkembangan selanjutnya, konflik Suriah tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika militer di lapangan, tetapi juga oleh berbagai upaya diplomasi internasional yang melibatkan banyak aktor. Berbagai mekanisme diplomatik seperti proses Astana yang melibatkan Rusia, Turki, dan Iran serta pembentukan Komite Konstitusi Suriah di bawah fasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mencerminkan upaya komunitas internasional untuk mencari penyelesaian politik terhadap konflik tersebut. Namun,

hingga periode penelitian ini berlangsung, berbagai inisiatif tersebut belum menghasilkan penyelesaian konflik yang komprehensif, sehingga konflik Suriah tetap menjadi salah satu isu keamanan internasional yang kompleks dan berlarut-larut.

### 2.1.2. Fragmentasi Aktor dalam Konflik Suriah

Seiring eskalasi konflik, jumlah aktor yang terlibat semakin bertambah dan terfragmentasi (Council on Foreign Relations, 2019). Pada tingkat domestik, konflik melibatkan pemerintah Suriah, kelompok oposisi bersenjata seperti *Free Syrian Army* (FSA), serta berbagai faksi milisi lokal yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Selain itu, kelompok ekstremis transnasional seperti ISIS dan Jabhat al-Nusra turut memperumit dinamika konflik (Capek & Abboud, 2017).

**Gambar 2. 4 Pemetaan Aktor dalam Konflik Suriah**



Sumber: (Avsa, 2024)

Peta tersebut menunjukkan bahwa konflik Suriah tidak memiliki dua pihak utama saja, melainkan melibatkan aktor negara, kelompok bersenjata non-negara, serta organisasi transnasional yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain.

Konflik Suriah berkembang menjadi konflik multi-aktor yang melibatkan berbagai kekuatan domestik, regional, dan global. Pada tingkat domestik, konflik mempertemukan pemerintah Suriah yang dipimpin Bashar al-Assad dengan berbagai kelompok oposisi bersenjata, terutama Free Syrian Army (FSA) yang muncul dari pembelotan militer pada awal konflik (Capek & Abboud, 2017). Namun oposisi tidak bersifat tunggal. Fragmentasi internal menghasilkan berbagai faksi dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda sehingga melemahkan kohesi oposisi serta mempersulit proses negosiasi politik. Selain itu, muncul pula kelompok Kurdi yang membentuk Syrian Democratic Forces (SDF) dan beroperasi terutama di wilayah timur laut Suriah dengan agenda otonomi wilayah Kurdi (Phillips, 2016; McGee, 2023).

Konflik semakin kompleks dengan kehadiran kelompok ekstremis transnasional seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan jaringan Al-Qaeda melalui Jabhat al-Nusra yang kemudian bertransformasi menjadi Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). Kehadiran kelompok-kelompok ini mengubah konflik Suriah dari perang saudara menjadi bagian dari dinamika perang global melawan terorisme.

Pada tingkat regional, konflik Suriah juga berkembang menjadi arena persaingan kepentingan negara-negara kawasan. Iran dan kelompok Hezbollah memberikan dukungan militer langsung kepada pemerintah Suriah, sementara Turki mendukung sejumlah kelompok oposisi serta melakukan operasi militer lintas batas untuk menahan ekspansi kelompok Kurdi di wilayah perbatasan (Capek & Abboud, 2017; Council on Foreign Relations, 2019). Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar pada fase awal konflik juga memberikan dukungan kepada kelompok oposisi tertentu (International Crisis Group, 2017).

Sementara itu, pada tingkat global, keterlibatan kekuatan besar semakin menginternasionalisasi konflik. Amerika Serikat memimpin koalisi internasional melawan ISIS serta memberikan dukungan militer kepada SDF. Di sisi lain, Rusia melakukan intervensi militer langsung sejak tahun 2015 untuk mendukung pemerintahan Bashar al-Assad (Capek & Abboud, 2017). Kehadiran berbagai aktor tersebut menjadikan konflik Suriah sebagai arena kompetisi geopolitik antara kekuatan besar dalam sistem internasional (Ghiselli & Alsudairi, 2022).

Keterlibatan berbagai aktor tersebut menghasilkan fragmentasi wilayah Suriah ke dalam beberapa zona kontrol, termasuk wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah, wilayah administrasi Kurdi di timur laut, serta kantong oposisi di Idlib yang berada di bawah perlindungan Turki (International Crisis Group, 2017). Konfigurasi aktor yang berlapis ini menyebabkan konflik Suriah sulit diselesaikan karena setiap aktor memiliki

kepentingan keamanan dan politik yang berbeda. Kompleksitas tersebut juga menjadikan konflik Suriah sebagai isu penting dalam politik internasional dan membentuk konteks yang memengaruhi bagaimana negara lain, termasuk China, merumuskan sikap dan kebijakan luar negerinya terhadap konflik tersebut (Burton et al., 2021).

## **2.2. Keterlibatan dan Kepentingan China dalam Konflik Suriah**

Dalam menanggapi konflik Suriah, China menegaskan bahwa penyelesaian konflik Suriah harus didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan negara, integritas wilayah, serta penyelesaian politik yang dipimpin oleh rakyat Suriah sendiri. Dalam berbagai pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China, pemerintah China menekankan bahwa penggunaan kekuatan militer eksternal maupun upaya perubahan rezim secara paksa bukanlah solusi yang dapat menciptakan stabilitas jangka panjang (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2012; Tian, 2012). Prinsip tersebut mencerminkan posisi dasar China dalam merespons konflik internasional, yaitu menolak intervensi eksternal dan menekankan penyelesaian konflik melalui mekanisme diplomatik.

Keterlibatan China dalam konflik Suriah paling terlihat melalui perannya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). China bersama dengan Rusia beberapa kali menggunakan hak veto yang dianggap berpotensi membuka jalan bagi intervensi militer eksternal atau pemberian sanksi yang dapat memperburuk konflik domestik Suriah. China juga menolak beberapa rancangan resolusi lain yang dinilai tidak seimbang, termasuk resolusi yang mengusulkan rujukan kasus ke Mahkamah Pidana Internasional serta resolusi terkait penghentian

operasi militer di Aleppo (Web Mechanix, 2014; People's Daily, 2016). Melalui posisi tersebut, China menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dicapai melalui proses politik dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat, bukan melalui tekanan eksternal atau tindakan militer internasional.

Selain melalui jalur diplomasi di DK PBB, China juga mendukung berbagai upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme multilateral. Pemerintah China secara konsisten menyatakan dukungan terhadap proses diplomasi internasional seperti Geneva Process dan Vienna Peace Talks serta mendukung kerangka penyelesaian konflik yang tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254. Resolusi ini menekankan pentingnya gencatan senjata, dialog politik inklusif, serta pembentukan proses transisi politik yang dipimpin oleh rakyat Suriah sendiri (Chinese Mission to the United Nations, 2025). Dukungan China terhadap berbagai proses diplomatik tersebut menunjukkan keterlibatan China dalam mendorong penyelesaian politik terhadap konflik Suriah.

Konflik Suriah juga memiliki implikasi keamanan yang diperhatikan oleh China. Pemerintah China menyatakan bahwa perkembangan kelompok ekstremis transnasional di Suriah, termasuk *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), menimbulkan ancaman terhadap stabilitas regional maupun keamanan internasional (Wang, 2013). China menyoroti keberadaan *foreign terrorist fighters* yang berasal dari berbagai negara, termasuk individu yang memiliki keterkaitan dengan *kelompok East Turkestan Islamic Movement* (ETIM) (Wang, 2013). Pemerintah China menyatakan kekhawatiran bahwa keberadaan kelompok tersebut dapat menimbulkan ancaman keamanan apabila anggota kelompok tersebut

kembali ke wilayah asalnya (Wang Yi, 2014). Oleh karena itu, China menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme dengan tetap menghormati kedaulatan negara dan hukum internasional.

Selain aspek keamanan, keterlibatan China dalam konflik Suriah juga berkaitan dengan kepentingan stabilitas kawasan Timur Tengah secara lebih luas. Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki signifikansi strategis bagi China, terutama berkaitan dengan keamanan energi dan jalur perdagangan internasional. Ketidakstabilan politik yang berkepanjangan di kawasan berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi regional serta keberlanjutan hubungan ekonomi China dengan negara-negara di Timur Tengah. Oleh karena itu, stabilitas politik kawasan menjadi salah satu faktor yang mendorong perhatian China terhadap perkembangan konflik Suriah.

Keterlibatan China juga terlihat melalui pemberian bantuan kemanusiaan serta dukungan terhadap proses pemulihan pascakonflik. Pemerintah China telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Suriah, termasuk bantuan pangan dan peralatan medis. Salah satu bentuk bantuan tersebut adalah pengiriman lebih dari 4.000 ton beras untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat Suriah yang terdampak konflik (People's Daily Online, 2022). Selain bantuan kemanusiaan, China juga menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam proses rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Suriah setelah konflik. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah China menyampaikan dukungan terhadap pembangunan kembali infrastruktur serta pemulihan ekonomi Suriah melalui kerja sama bilateral, program *Belt and Road Initiative* (BRI) maupun forum multilateral

seperti *China–Arab States Cooperation Forum* (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2023).

Dibandingkan dengan konflik lain di kawasan Timur Tengah, konflik Suriah memiliki signifikansi khusus dalam perhatian kebijakan luar negeri China karena tingkat kompleksitas dan internasionalisasi konflik yang relatif tinggi. Konflik ini tidak hanya melibatkan aktor domestik, tetapi juga mempertemukan berbagai kekuatan regional dan global dalam satu ruang konflik yang sama, termasuk Rusia, Amerika Serikat, Iran, dan Turki. Kondisi tersebut menjadikan Suriah sebagai salah satu arena interaksi kepentingan strategis berbagai aktor internasional. Bagi China, situasi ini menciptakan konteks diplomatik yang lebih kompleks dibandingkan konflik regional lainnya, karena setiap posisi yang diambil berpotensi memengaruhi hubungan China dengan berbagai mitra strategis di kawasan maupun di tingkat global. Oleh karena itu, konflik Suriah menjadi kasus yang relevan untuk mengamati bagaimana China merumuskan sikap dan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi konflik internasional yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan sekaligus.

Keterlibatan China dalam konflik Suriah menunjukkan kombinasi antara kepentingan keamanan, stabilitas kawasan, serta kepentingan ekonomi jangka panjang. China menempatkan dirinya sebagai aktor yang mendorong penyelesaian politik melalui mekanisme multilateral, menolak intervensi militer eksternal, serta mendukung stabilisasi dan rekonstruksi pascakonflik. Melalui pendekatan tersebut, konflik Suriah menjadi salah satu konteks penting yang memperlihatkan

bagaimana China merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi konflik internasional yang kompleks.

**Tabel 2. 1 Rekapitulasi Kebijakan dan Tindakan Resmi China dalam Konflik Suriah (2015-2023)**

Tahun	Bentuk Tindakan Resmi	Forum/Instrumen	Substansi Tindakan	Sumber Utama
2015	Partisipasi diplomatik	Vienna Peace Talks / ISSG	China ikut dalam perundingan internasional penyelesaian konflik Suriah	UNSC Resolution 2254 (2015)
2016	Veto resolusi DK PBB	DK PBB	Menolak resolusi gencatan senjata Aleppo	UNSC Report (2016)
2017	Pernyataan resmi di PBB	DK PBB	Penegasan zero-tolerance terhadap terorisme dan hormat kedaulatan Suriah	UN Mission China (2017); Hua Chunying's Regular Press Conference (2017)
2018	Dukungan proses politik	Internasional Symposium on the Syrian Issue	Dukungan terhadap kesepakatan politik untuk perdamaian Suriah dan implementasi UNSCR 2254	MFA China (2018)
2019	Veto bantuan lintas batas	DK PBB	Menolak mekanisme bantuan tanpa persetujuan Damaskus	UNSC Reports (2019)
2019-2023	Bantuan kemanusiaan	Bilateral	Bantuan kemanusiaan berupa pangan dan material dengan	Kobierski (2020); China International

			total sekitar 430 million yuan (\$64.4 million)	Development Cooperation Agency (2023); The State Council Information Office of the People's Republic of China (2023)
2021	Dukungan proses konstitusi	DK PBB	Dukungan kerja Komite Konstitusi Suriah	UN Mission China (2021)
2022	Kemitraan strategis	Bilateral	Peresmian bergabungnya Suriah ke dalam BRI	National Development and Reform Commission of the People's Republic of China (2022)

**Sumber:** Diolah penulis dari United Nations Security Council (2016 & 2019); United Nations Security Council Resolutions 2254 (2015); Permanent Mission of the People's Republic of China to the United Nations (2017; 2021); Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China (2017; 2018; 2023); National Development and Reform Commission of the People's Republic of China (2022); China International Development Cooperation Agency (2023); The State Council Information Office of the People's Republic of China (2023)

Rekapitulasi kebijakan dan tindakan resmi China dalam konflik Suriah menunjukkan pola keterlibatan yang konsisten melalui jalur diplomatik, institusional, dan pembangunan, dengan penekanan kuat pada prinsip non-intervensi, kedaulatan negara, serta penyelesaian politik yang dipimpin oleh rakyat Suriah sendiri. Namun, di balik konsistensi normatif tersebut, tindakan China, mulai dari penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, dukungan selektif terhadap bantuan kemanusiaan, hingga

peningkatan kerja sama bilateral pasca-konflik, mengindikasikan adanya kepentingan strategis tertentu yang melampaui narasi normatif semata. Oleh karena itu, Bab III akan menganalisis lebih lanjut dinamika kepentingan strategis China yang melatarbelakangi kebijakan luar negerinya dalam konflik Suriah.

## **2.2. Kerangka Normatif Kebijakan Luar Negeri China**

### **2.2.1. Prinsip Non-Intervensi**

China memiliki fondasi normatif utama yang kuat dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Fondasi ini adalah Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai (*Five Principles of Peaceful Coexistence*). Prinsip-prinsip ini pertama kali dikemukakan oleh Premier Zhou Enlai pada 31 Desember 1953 sebagai respons langsung China terhadap tekanan eksternal, intervensi militer asing, perjanjian tidak setara dan pelanggaran kedaulatan akibat dominasi kekuatan kolonial Barat sejak abad ke-19 hingga awal berdirinya Republik Rakyat China (RRC) (DUCHÂTEL et al., 2014). RRC pada tahun 1949, ketika negaranya mengalami isolasi diplomatik, tekanan militer dari kekuatan besar, serta keterlibatan langsung dalam Perang Korea yang memperkuat persepsi ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan nasional. Dalam kondisi tersebut, China memandang campur tangan eksternal sebagai ancaman utama terhadap stabilitas negara dan kelangsungan pemerintahan nasional (DUCHÂTEL et al., 2014).

Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai diperkuat keberadaannya melalui pernyataan bersama antara China, India, dan Myanmar pada tahun 1954 yang secara resmi menetapkan lima prinsip tersebut sebagai pedoman hubungan bilateral mereka (Embassy of the People's Republic of China in the Islamic Republic of Iran, 2014). Pada tahun 1955, lima prinsip ini dimasukkan dalam *Ten Principles for Conducting Four Internasional Relations* yang diadopsi pada KTT Asia-Afrika di Bandung sebagai norma hubungan internasional yang adil dan setara (Embassy of the People's Republic of China in the Islamic Republic of Iran, 2014).

Pada tahun 1970, PBB mengadopsi *Declaration on Principles of Internasional Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States* yang mencakup konten yang memiliki poin-poin dari lima prinsip tersebut, hal ini menjadi pertanda bahwa norma ini telah diterima secara luas dalam hukum internasional modern (Ministry of Foreign Affairs and Trade of the People's Republic of China, 2024). Lima prinsip tersebut meliputi (1) penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial; (2) saling tidak melakukan agresi; (3) saling tidak mencampuri urusan internal; (4) kesetaraan dan saling menguntungkan; (5) hidup berdampingan secara damai (China Radio International, 2024). Prinsip-prinsip ini secara eksplisit menolak intervensi dalam urusan internal negara lain dan dapat disederhanakan sebagai prinsip non-intervensi, karena seluruhnya berangkat dari upaya menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan

negara dan penolakan terhadap campur tangan eksternal dalam urusan domestik negara lain (Zheng, 2016).

Prinsip non-intervensi dalam kebijakan luar negeri China adalah norma fundamental yang menegaskan bahwa negara-negara harus saling menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan internal satu sama lain (Samuli Seppänen & Smith, 2025). Prinsip ini bersumber dari pengalaman historis China terhadap tekanan eksternal dan dimasukkan sebagai komponen utama dalam hubungan bilateral dan multilateralisme, terutama untuk mencegah intervensi dalam konflik domestik negara lain tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan (DUCHÂTEL et al., 2014). Berdasarkan pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri China (2024), prinsip non-intervensi dalam kebijakan luar negeri China dipahami sebagai penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara, serta penolakan tegas terhadap campur tangan eksternal dalam urusan domestik negara lain (Ministry of Foreign Affairs and Trade of the People's Republic of China, 2024a).

### **2.2.2. Praktik Prinsip Non-Intervensi dalam Kebijakan Luar Negeri China**

Dalam praktik kebijakan luar negeri, prinsip non-intervensi menempati posisi sentral sebagai pedoman perilaku diplomatik China dalam merespons konflik internal negara lain (Zheng, 2016). Prinsip ini tidak hanya bersifat normatif atau deklaratif, tetapi diterjemahkan ke dalam sikap resmi, pernyataan diplomatik, serta tindakan China di berbagai forum

bilateral dan multilateral (Ministry of Foreign Affairs and Trade of the People's Republic of China, 2024a; Samuli Seppänen & Smith, 2025). Melalui prinsip non-intervensi, China menegaskan bahwa penyelesaian konflik domestik suatu negara harus didasarkan pada proses internal tanpa paksaan eksternal, serta menolak upaya aktor luar yang berpotensi mencampuri urusan dalam negeri suatu negara (Ministry of Foreign Affairs and Trade of the People's Republic of China, 2024a; Samuli Seppänen & Smith, 2025).

Dalam forum multilateral, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB, prinsip non-intervensi menjadi dasar utama sikap China terhadap resolusi-resolusi yang berkaitan dengan konflik bersenjata internal (Chaziza, 2021). China secara konsisten menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara yang bersangkutan, serta menolak langkah-langkah yang berpotensi melegitimasi intervensi militer atau perubahan rezim secara paksa (Samuli Seppänen & Smith, 2025). Sikap ini tercermin dari kecenderungan China dalam mendorong penyelesaian konflik melalui dialog konflik dan negosiasi damai, dibandingkan penggunaan instrumen koersif seperti intervensi militer atau sanksi sepihak (Zheng, 2016).

Dalam konflik Suriah, prinsip non-intervensi diartikulasikan secara eksplisit melalui penekanan China terhadap konsep “*Syrian-led, Syrian-owned*” *political process*—proses politik Suriah tanpa adanya intervensi atau campur tangan asing—yang sangat diinginkan oleh pemerintah negara

Suriyah sendiri (Permanent Representative of the Syrian Arab Republic, personal communication, October 23, 2019). Konsep tersebut mencerminkan pandangan bahwa proses politik dan masa depan pemerintahan Suriyah harus ditentukan oleh rakyat Suriyah sendiri tanpa campur tangan langsung dari pihak luar. Keterlibatan komunitas internasional, menurut pandangan China, hanya dapat dibenarkan sejauh bersifat mendukung dan tidak mengintervensi proses politik domestik (Ministry of Foreign Affairs and Trade of the People's Republic of China, 2024b). Prinsip non-intervensi milik China bukan berarti meniadakan peran aktor internasional, tetapi membatasi bentuk keterlibatan tersebut agar tidak melanggar kedaulatan negara (Zheng, 2016; Yuliantoro, 2025).

Selain itu, prinsip non-intervensi juga tercermin dalam sikap China terhadap penggunaan sanksi internasional dan intervensi militer sebagai instrumen penyelesaian konflik (Zheng, 2016; Chaziza, 2023). China memandang bahwa tekanan eksternal berpotensi memperburuk kondisi kemanusiaan dan menghambat stabilitas jangka panjang (Samuli Seppänen & Smith, 2025). Penolakan terhadap sanksi internasional dan intervensi militer asing dapat dilihat dari posisi China terhadap sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Rusia dalam Perang Rusia-Ukraina, penolakan terhadap sanksi sepihak AS terkait Iran, dan sanksi internasional lainnya yang tidak memiliki basis hukum internasional atau putusan dari DK PBB (Ministry of Foreign Affairs and Trade of the People's Republic of China, 2026).